

2023

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU

Kata Pengantar

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon III ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategik (Renstra) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu kami berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2023. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesainya laporan ini.

Akhirnya kami mengharapkan masukan berupa kritik dan saran pembaca untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dan kiranya dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance* di negeri tercinta.

Semende Darat Ulu, Januari 2024
Camat Semende Darat Ulu

H. CHOLID TRI AQUARIAN, S.STP.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197901291998021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja instansi SKPD Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik (RENSTRA).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategik, berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh SKPD Kecamatan Semende Darat Ulu dengan total kegiatan 39 kegiatan yang tercakup dalam 6 program. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*.

Pengukuran dan analisis capaian sasaran strategik dilakukan terhadap 3 sasaran yang mencakup 3 indikator kinerja setingkat outcomes yang dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu **sangat baik** dengan tingkat capaian $\geq 90\%$, **baik** dengan tingkat capaian 81% - 90%, **cukup** dengan tingkat capaian 71% - 80%, **kurang** dengan tingkat capaian $\geq 70\%$, dan **sangat kurang** dengan tingkat capaian 0%.

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategik terhadap 3 sasaran yang terdiri dari 5 indikator kinerja setingkat outcomes dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 3 sasaran atau 100% persen dari total sasaran
- b. Pencapaian sasaran baik (81% - 90%,) terdiri atas 0 sasaran atau 0% persen dari total sasaran

- c. Pencapaian sasaran cukup (71% - 80%) terdiri atas 0 sasaran atau 0% dari total sasaran.
- d. Pencapaian sasaran kurang ($\geq 70\%$) terdiri atas 0 sasaran atau 0% dari total sasaran.
- e. Pencapaian sasaran sangat kurang (0%) terdiri atas 0 sasaran atau 0% dari total sasaran.

Anggaran belanja Kecamatan Semende Darat Ulu setelah perubahan pada Tahun 2023, alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 3.624.340.566** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.401.360.744,10** (**Tiga Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat koma Sepuluh Rupiah**) atau **93,85** persen

Penyusunan LAKIP SKPD Kecamatan Semende Darat Ulu ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian tujuan serta sasaran guna mewujudkan visi dan misi organisasi Kecamatan Semende Darat Ulu yaitu :

“ Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan”

Semende Darat Ulu, Januari 2024

Camat Semende Darat Ulu



H. CHOLID TRI AQUARIAN, S.STP.,M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197901291998021001

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Pelayanan SKPD	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan LAKIP	3
D. Format Penulisan LAKIP	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
A.1 Pernyataan Visi dan Misi	7
A.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
B. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD	12
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	12
B. Analisis atas Pencapaian Sasaran Stratejik 2023	12
C. Analisis atas Pencapaian Keuangan 2023	14
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kecamatan Semende Darat Ulu adalah merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana Kecamatan yang lain Kecamatan Semende Darat Ulu adalah juga merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara rill bentuk pelayanan yang rutin antara lain memproses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), Pengantar Surat Asuransi Kematian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Izin Gangguan (HO), pembuatan Surat Pengantar dan rekomendasi berbagai keperluan masyarakat, legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan sebagainya.

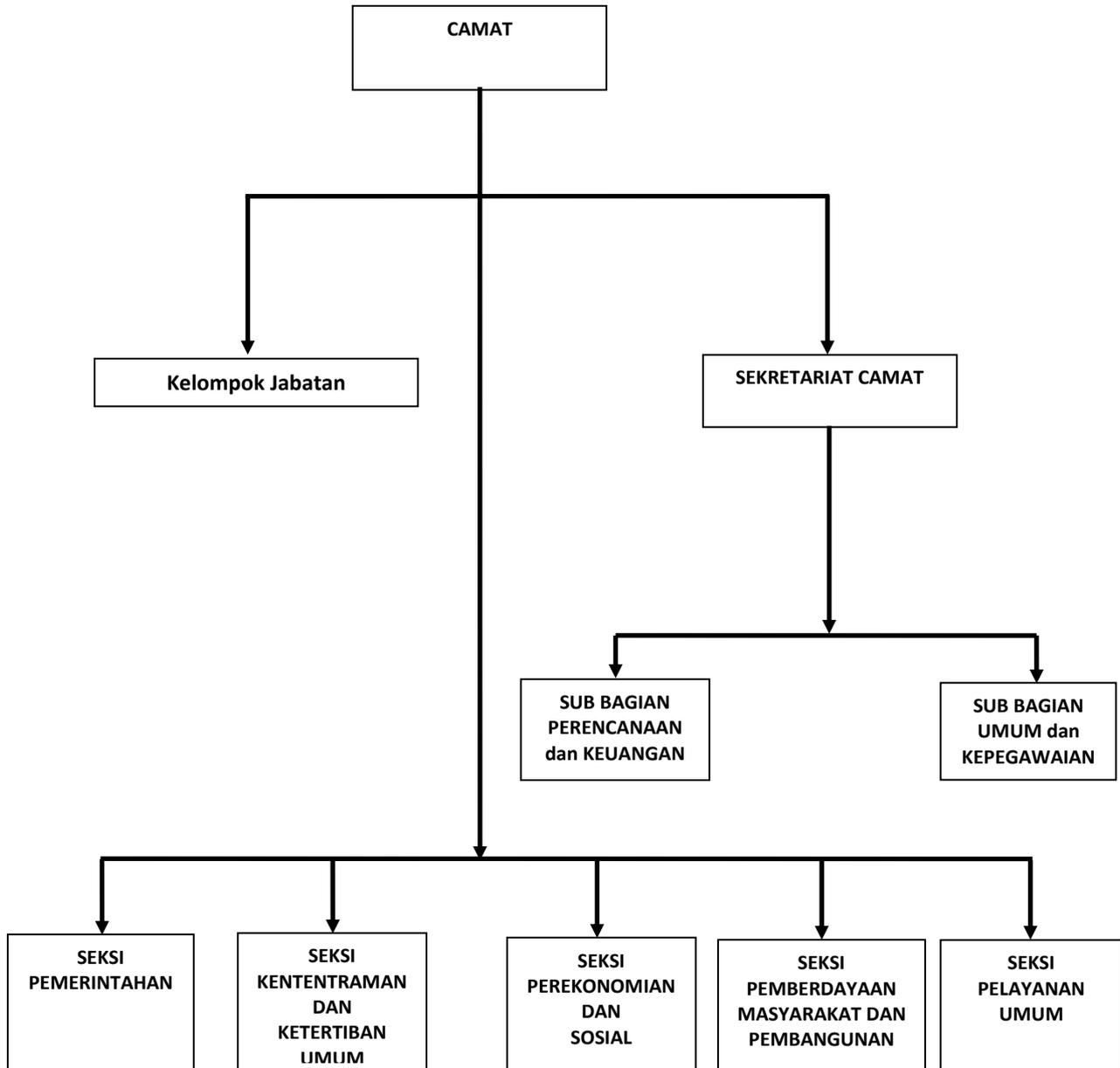
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 No. 2), struktur organisasi Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - a. Subbag. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag. Umum dan Kepegawaiaan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian dan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan dapat ditampilkan dengan bagan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM**



Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- A. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- B. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- C. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri ;
- D. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan;
- E. Pengolahan bahan usulan ekonomi pembangunan di Kecamatan;
- F. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- G. Pelayanan masyarakat dan fasilitasi pengaduan penyelesaian masalah;
- H. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- I. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Kecamatan;
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang di kerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP bagi Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi

manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Kecamatan Semende Darat Ulu dapat di penuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat). *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama Tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. FORMAT PENULISAN LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Kecamatan Semende Darat Ulu selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Tahun 2023 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum gambaran Kecamatan Semende Darat Ulu dengan penekanan kepada aspek strategis Kecamatan Semende Darat Ulu juga menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kecamatan Semende Darat Ulu, perencanaan kinerja/rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

Dalam bab ini disajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Semende Darat Ulu. Juga diuraikan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja Kecamatan Semende Darat Ulu Tahun 2023 dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka di harapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju kesana' dijawab

dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana strategis Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (Lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Muara Enim agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (Lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan kabupaten Muara Enim. Renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim;
- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- Sebagai 'alat' untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
- Sebagai 'alat' bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Renstra Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim 2013-2023 tersebut.

A.1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah atau

organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolak ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Dari uraian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dapat di ambil kesimpulan bahwa Kecamatan Semende Darat Ulu dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan berkaitan dengan misi ke-7 yaitu “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik”. Keterlibatan SKPD Kecamatan Semende Darat Ulu untuk misi-misi ini akan diterjemahkan dalam bentuk program-program.

Adapun apabila kita tinjau faktor pendorong dan faktor penghambat bila ditinjau dari Renstra Kecamatan Semende Darat Ulu adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendorong :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- Jumlah SDM yang cukup dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka ragam;
- Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Peran Kecamatan yang semakin strategis.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memudahinya sistem informasi pelayanan di Kecamatan
- Masih lemahnya koordinasi antar SKPD/unsur vertikal, sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi pelayanan;
- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran merupakan suatu penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dalam jangka waktu tahunan, semesteran , triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Semende Darat Ulu mulai dari unsur Pimpinan, maupun pada Pelaksana dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun sasaran yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

B. Perencanaan Kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2018-2023 disusunlah rencana kinerja (performance plan)/rencana kerja tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang sasaran, indikator sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran tersebut. Dalam perencanaan kinerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 diuraikan sasaran – sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023, sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2023.

Tabel
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	a. Rata-rata Capaian Kegiatan Pemerintahan yang terselenggara	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	a. Nilai Sakip Kecamatan	61,00

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/organisasi perangkat daerah (OPD).

Penetapan kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada Kecamatan Semende Darat Ulu dengan harapan perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan atasan (Bupati) dapat diwujudkan pada setiap tahun anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	a. Rata-rata Capaian Kegiatan Pemerintahan yang terselenggara	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	a. Nilai Sakip Kecamatan	61,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam menginformasikan kepada stakeholder sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra Organisasi, sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Kecamatan Semende Darat Ulu sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Muara Enim, Khususnya masyarakat Kecamatan Semende Darat Ulu, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2023.

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja (performance plan) yang dibandingkan dengan realisasinya (performance result). Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEJIK 2023

Secara umum Kecamatan Semende Darat Ulu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Semende Darat Ulu. Dari sasaran yang telah ditetapkan telah

dilaksanakan 6 program dan 39 kegiatan yang berpedoman pada DPA untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dari pelaksanaan program yang menjadi tolak ukur sasaran dengan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat outcome. Berdasarkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan terdiri dari 3 sasaran kinerja dari 9 indikator kinerja tingkat capaian sasaran dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : pencapaian sasaran **sangat baik (≥91%)** terdiri atas 3 sasaran, pencapaian sasaran **baik (81%-90%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **cukup (61%-80%)** terdiri atas 0 sasaran, pencapaian sasaran **kurang (≤60%)** terdiri atas 0 sasaran dan pencapaian sasaran **sangat kurang (0%)** terdiri atas 0 sasaran.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	a. Rata-rata Capaian Kegiatan Pemerintahan yang terselenggara	100 %	100 %	93,04%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	a. Nilai Sakip Kecamatan	61,00	Belum dilakukan Penilaian oleh Dinas Terkait	

C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN 2023

Anggaran belanja Kecamatan Semende Darat Ulu setelah perubahan pada Tahun 2023, alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 2.934.131.497,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.729.806.429,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Target pencapaian keuangan Kecamatan Semende Darat Ulu mengikuti target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim yaitu 85%. Tahun 2023 pencapaian keuangan Kecamatan Semende Darat Ulu hanya 93,04%. Kondisi ini melebihi target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim.

Adapun rincian pencapaian keuangan Kecamatan Semende Darat Ulu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1		2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,692.259.451	2.370.321.236	93,32
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.028.000	16.418.100	86,28
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.790.000	15.968.100	89,76
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.238.000	450.000	36,35
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.145.469.406	1.993.195.895	92,90
	1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.127.043.406	1.976.005.895	92,90
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	18.426.000	17.190.000	93,29
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.033.000	7.587.750	63,06
	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.648.000	5.787.000	89,47

	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.565.000	1.800.750	32,36
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.070.000	10.070.000	52,81
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	0	0
	2	Pengadaan pakaian dinas	10.070.000	10.070.000	100,00
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.628.010	230.841.801	83,13
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.846.000	5.493.000	83,13
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.176.6000	5.809.000	83,13
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.307.250	42.650.800	83,13
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.950.000	5.734.400	96,38
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.080.000	75,00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.910.160	170.074.601	
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	180.198.311	170.447.258	75,00
	1	Pengadaan Mebel	43.256.311	42.556.340	99,51
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.942.000	56.342.000	95,25
	3	Pengadaan Motor Dinas	80.000.000	71.605.258	89,51
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.605.199	44.556.340	81,60
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.125.800	5.080.000	97,40
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.869.899	6.306.340	58,02
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.520.000	33.170.000	86,11
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.469.740	274.306.000	98,92

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.883640	46.704.850	95,54
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.410.000	5.630.000	87,83
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0		
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.176.100	274.306.000	99,74
2	POGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		133.262.400	130.145.000	
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	94.194.400	91.120.000	
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	39.963.400	39.025.000	
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan	29.963.400	29.963.400	
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39.068.000	39.025.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		322.154.700	306.065.250	95,01
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	322.154.700	306.065.250	95,01
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.605.200	16.550.250	99,67
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di		0	

		Wilayah Kerja Kecamatan			
	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	305.549.500	289.515.000	94,75
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		152.410.800	150.076.000	98,47
	1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	152.410.800	150.076.000	98,47
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	142.366.000	142.366.000	100
	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.035.800	7.710.000	76,82

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.170.942.255** terealisasi sebesar **Rp. 2.956.607.484 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluah Enm Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** atau **93,24 persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 453.398.311** terealisasi sebesar **Rp. 444,753.258 (Empat ratus Empat PulUH Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** atau **98,09 persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Teduga dialokasikan sebesar **Rp. 0,00** terealisasi sebesar **Rp 0,00 (Nol Rupiah)** atau **0,00 persen** yang dialokasikan untuk membiayai keperluan darurat yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan sebesar **Rp. 0,00** terealisasi sebesar **Rp 0,00 (Nol Rupiah)** atau **0,00 persen** yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada Tahun 2023 Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 30 subkegiatan, antara lain yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 2,692.259.451** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.370.321.236** atau **93,32 persen** dengan capaian kinerja output sebesar **100,00 persen**. Program ini terdiri dari **8 (delapan)** kegiatan dan **22 (dua puluh dua)** subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 17.790.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.968.100** atau sebesar **86,28 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 1.238.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 450.000** atau sebesar **36,35 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 2.127.043.406** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1976.005.895** atau sebesar **92,90 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

- b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 18.426.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.17.190.00** atau sebesar **93,29persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 12.033.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.587.750** atau sebesar **63,06 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.565.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.800.750** atau sebesar **32,36 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar **Rp. 9.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,00** atau sebesar **0,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **0,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **0,0**.
 - b. Subkegiatan Pakaian Dinas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar **Rp. 10.070.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.070.000** atau sebesar **0,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98 persen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 5.846.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.493.000** atau sebesar **83,13 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp.6.176.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.809.000** atau sebesar **83,13 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 51.307.250** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.42.650.800** atau sebesar **83,13 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp. 5.950.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.734.400** atau sebesar **96,38 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.440.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.080.000**, atau sebesar **75 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 170.910.160** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 170.074.601** atau sebesar **99,65 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp. 43.256.311** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 42.556.340** atau sebesar **99,51 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 56.942.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 56.342.000** atau sebesar **99,25 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 5.125.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.080.000** atau sebesar **97,40 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp. 10.869.899** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.306.340** atau sebesar **58,02 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 38.520.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 38.520.000,00** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar **Rp. 48.883.640** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 46.704.850** atau sebesar **95,54 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **89 ,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 6.410.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.630.000** atau sebesar **87,83 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 6.300.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.050.000,00** atau sebesar **96,03 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 289.176.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 274.306.000** atau sebesar **99,74 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

2. Pogram Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Pogram Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar **Rp. 133.262.400** dengan realisasi sebesar **Rp. 130.145.000** atau **91,15 persen** dengan capaian kinerja output sebesar **100,00 persen**. Program ini terdiri dari **1 (satu)** kegiatan dan **3 (tiga)** subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar **Rp. 39.963.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.9693.400** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan dengan anggaran sebesar **Rp. 29.963.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 29.963.400** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
- e. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar **Rp. 39.068.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.025.00** atau sebesar **85,75 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

3. Pogram Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Pogram Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar **Rp. 322.154.700** dengan realisasi sebesar 306.065.250 atau **95,01 persen** dengan capaian kinerja output sebesar **100,00 persen**. Program ini terdiri dari **1 (satu)** kegiatan dan **2 (dua)** subkegiatan sebagai berikut.

- 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar **Rp. 16.605.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.550.250** atau sebesar **99,67 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja dengan anggaran sebesar **Rp.** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.** atau sebesar **1 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - c. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 305.549.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 289.515.000** atau sebesar **94,75 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 152.410.800** dengan realisasi sebesar **Rp. 150.076.000** atau **98.47 persen** dengan capaian kinerja output sebesar **100,00 persen**. Program ini terdiri dari **1 (satu)** kegiatan dan **2 (dua)** subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 142.366.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 142.366.000** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
 - b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.035.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.710.000** atau sebesar **76,82 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, yakni :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
3. Anggaran belanja Kecamatan Semende Darat Ulu setelah perubahan pada Tahun 2023, alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 3.624.340.566** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.401.360.744,10** (**Tiga Milyar Empat Ratus Satu Juta tiga ratus EnamPu;uh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat , Sepuluh Rupiah**) atau **93,85** persen.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Semende Darat Ulu Tahun 2023 ini dibuat, kiranya dapat menjadi masukan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Atas segala perhatian diucapkan terimakasih.

Semende Darat Ulu, Januari 2024



H. CHOLID TRI AQUARIAN,S.STP.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197901291998021001